

Penyertaan Modal PDAM Muna ditolak Dewan, Nuryayat Fariki : 2.000 Pemohon Terpaksa Gigit Jari

MUNA, SultraNET. | Ditolaknya usulan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Muna oleh DPRD dinilai sangat merugikan masyarakat.

Dirut PDAM Muna, Nuryayat Fariki, mengaku heran ketika para wakil rakyat mengeluarkan usulan anggaran itu dari APBD dan dikembalikan ke Pemkab. Padahal, anggaran dana tersebut akan digunakan untuk hibah air minum perkotaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sebagai pancangan untuk mendapatkan dana hibah dari pusat.

“Dana itu sebagai komitmen Pemkab melalui PDAM untuk mendapatkan dana hibah dari pusat. Sekarang karena gagal, maka hibah dari pusat tidak jadi,” ungkap Nurhayat kepada media ini, umat (25/01/2019).

Menurutnya, seharusnya DPRD berpikir rasional terkait penyertaan modal itu, karena itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat diwilayah Laino, Wamponiki Pantai, Lagasa dan masyarakat Kota Raha, apalagi DPRD telah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal di tahun 2016 lalu.

” Menjadi lucu ketika dewan mengeluarkan anggaranya dari dokumen APBD. Ini sama menjilat ludah sendiri dan bukti bahwa mereka tidak berpihak pada masyarakat. Mereka lebih menyetujui anggaran Rp 1,5 M untuk penelitian yang belum jelas asas manfaatnya” Keluhnya

Apalagi Penolakan dana itu dikait-kaitkan keranah politik. DPRD menganggap dana itu untuk kepentingan politik. Padahal itu tidak benar. Sesuai rencana dana tersebut akan digunakan di bulan Mei.

” Jadi tidak ada kaitanya dengan Pilcaleg atau apa dana itu juga akan diganti di bulan September,” Bebernya

Saat pembahasan Anggaran pun, para wakil rakyat itu tidak pernah memberi ruang baginya untuk menjelaskan penggunaan dana tersebut namun tiba-tiba saja, anggaran itu dikeluarkan.

“Saya diundang hanya saat rapat gabungan komisi. Itupun tidak diberi ruang untuk menjelaskan. Tiba-tiba saja dewan mengeluarkan anggarannya dan dikembalikan ke Pemkab,” ucapnya

Selain itu Yayat mengungkapkan bahwa dana pinjaman Rp 10 Milyar untuk instalasi jaringan perpipaan di Kecamatan Kontunaga dan Loghia yang melekat di Dinas PUPR, tidak ada kaitanya dengan usulan penyertaan modal itu.

“Tidak ada hubungannya. Pernyataan modal itu untuk memenuhi kebutuhan air minum MBR diwilayah perkotaan,” bebernya.

Kini bantuan hibah dari pusat tinggalah kenangan. Sekitar 2.000 masyarakat yang telah mendaftar untuk mendapatkan air bersih hanya bisa gigit jari akibat penolakan anggaran oleh DPRD Muna.

Untuk itu Yayat akan terus berusaha untuk mendapatkan hibah tersebut. Kini surat-surat administrasi yang dibutuhkan seperti, Perda penyertaan modal, idele kapasitas dan surat minat bupati telah disiapkan.

“Dengan terpaksa, kita harus bersabar tahun depan (2020). Karena kalau untuk APBD-P tidak memungkinkan lagi,”pungkasnya

Permabudhi Sultra Siap Mengabdikan Untuk Sultra

Kendari, SultraNET. | Dalam upaya mendorong pembangunan pada bidang agama serta majelis-majelis Agama Budha, Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi

terbentuk.

Ketua umum Permabudhi Pusat Arief Harsono melalui Suwito resmi melantik Michael Tanjaya sebagai Ketua umum Permabudhi Sultra periode 2019 - 2023 di Fortune front one Hotel Kendari.

Pelantikan dan Pengukuhan itu juga di rangkaikan dengan pelantikan pengurus cabang permabudhi kabupaten dan kota Se-Sultra yang dihadiri oleh Kabag Kesra Gubernur Sultra Beangga Harianto.

Dalam sambutannya Kabag Kesra Gubernur Sultra, Kamis, (24/1/2019) Beangga Harianto Sangat mengapresiasi atas terbentuknya kepengurusan permabudhi di Sultra.

“ Kami berharap prambudhi menjadi mitra strategis pemerintah dan permabudhi menjadi angin segar bagi kita semua agar kedepan umat buddha di Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara semakin maju dan berkembang di setiap ruang lingkup pengabdian yang dilaksanakannya” jelasnya

Di tempat yang sama Ketua Permabudhi Sulawesi Tenggara Michael Tanjaya mengungkapkan, Permabudhi di sultra bisa menjembatani agama buddha di sektor pemerintah dan berkomitmen untuk mewujudkan persatuan umat budha, dan akan memberikan manfaat untuk sultra seperti lilin di gelapnya malam dan teratai di atas lautan.

“ Ke depan nantinya kami mengadakan upacara waisak bersama , bakti sosial donor darah empak kali setahun , akan membentuk koperasi untu membantu UKM dan masyarakat, penanaman sejuta pohon” ucap Michael

Reporter : Yuda

Istri Wali Kota Kendari Resmi Jabat Ketua TP-PKK dan Dekranasda

Kendari, SultraNET. | Istri Wali Kota Kendari Sri Lestari, S.Pd., M.Si resmi menjabat sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kota Kendari sisa masa bakti 2017-2022. di lantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Sultra Agista Ali Mazi

Dalam sambutannya, Kamis (24/1/19). Agista Ali Mazi menjelaskan, gerakan PKK bertujuan untuk memberdayakan keluarga demi membangun kesejahteraan masyarakat yang menjadikan keluarga kedesaan dan perkotaan sebagai sasaran utama.

Selain itu, kata Agista, Dekranasda bertujuan untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya melalui pembinaan dan pengembangan seni kerajinan yang ada untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan para perajin.

“Dengan jabatan yang diemban di harapkan mampu menguatkan sepuluh program pokok PKK serta meningkatkan prestasi melalui inovasi kearifan lokal. Salah satu caranya yaitu, pembinaan yang berkesinambungan secara berjenjang,” ungkap Agista

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Pembina TP-PKK Kota Kendari, Sulkarnain mengatakan, dengan keragaman dan potensi yang dimiliki Kota Kendari, baik meliputi makanan khas, tenunan dan berbagai kerajinan yang dimiliki oleh masyarakat, peran PKK sangat penting sebagai mitra kerja pemerintah kota. Dalam berkontribusi tim PKK akan mendukung peningkatan pembangunan daerah mulai dari unit terkecil di masyarakat melalui program pokoknya.

“Mari senantiasa kita meningkatkan semangat kerja dan jiwa patriotisme, inovasi dan kreatif serta sadar akan komitmen, tugas dan tanggung jawab dalam memajukan daerah yang kita cintai ini,” tutupnya.

DPRD Muna sepakat Tolak Penyertaan Modal untuk PDAM

MUNA, SultraNET. | Usulan anggaran sebesar Rp 2 miliar buat penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Muna ditolak oleh DPRD. Anggaran tersebut selanjutnya dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

” Untuk itu Kita kembalikan ke Pemkab untuk digunakan pada program lain. Kalau untuk penyertaan modal di PDAM tidak boleh,” kata Irwan.

La Irwan, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Muna mengatakan pada media ini, Kamis (24/01/2019) bahwa penyertaan modal itu ditolak lantaran pihak PDAM belum melakukan presentase untuk penggunaan dana itu.

Ditambah lagi bila untuk kebutuhan air bersih telah dianggarkan melalui dana pinjaman di bank sebesar Rp 10 miliar.

“Bagaimana mau ada penyertaan modal lagi, sementara untuk air bersih sudah ada pinjaman. Ini menjadi rancu,” katanya.

Lanjut politisi Hanura itu, anggaran Rp 10 M untuk perpipaan itu melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun, bila nantinya pekerjaan tersebut telah selesai, maka akan diserahkan ke PDAM sebagai penyertaan modal Pemkab.

“PDAM yang akan kelola sebagai penerima manfaat” bebernnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Muna, Abdul Radjab Biku menerangkan, pengalihan usulan anggaran Rp 2 miliar itu merupakan suara dari seluruh fraksi yang dibawa paska rapat gabungan komisi.

“Alasanya sangat jelas. Karena kalau pekerjaan nantinya yang di PU itu

selesai, maka akan diserahkan ke PDAM sebagai penyertaan modal,” jelasnya.

Demi Hak Pilih, KPU Bombana Sosialisasi Langsung ke Rumah Penyandang Disabilitas

Bombana, SultraNET. | Tiga anggota KPU Kabupaten Bombana, menyusuri tiap desa di Kecamatan Rarowatu, Rabu (23/1/2019) lalu. Mereka keluar masuk rumah-rumah warga yang teridentifikasi sebagai pemilih penyandang disabilitas, memberi informasi soal Pemilu 2019 sekaligus ajakan mencoblos ke TPS, 17 April mendatang.

Setidaknya, ada 27 pemilih yang hari itu disasar. Metodenya, para komisioner bersama PPK, PPS termasuk Relawan Demokrasi (Relasi) menyambangi tiap rumah pemilih yang teridentifikasi disabilitas.

“Kami anggap cara ini (mengunjungi ke rumah), lebih manusiawi,” kata Abdi Mahatma, komisioner KPU Bombana, soal alasan sosialisasi door to door itu.

Bersama dua anggota KPU Bombana lain, Kasjumriati Kadir dan Soeherman, mereka menemui para calon pemilih di rumahnya, berbincang dengan empati, dan menyampaikan bila Pemilu akan segera digelar.

“Mereka juga kami kenalkan soal 5 surat suara, jumlah dan nama Peserta Pemilu,” tambah Kordiv Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Bombana itu.

Menariknya, rata-rata para penyandang disabil, lebih paham jika diedukasi

dengan pendekatan bahasa lokal. Komunikasi dengan berbahasa ibu, yakni Bahasa Moronene diselingi dengan candaan khas lokal, ternyata mencairkan suasana.

“Kebetulan, saya bisa berkomunikasi dengan bahasa lokal, jadi sangat membantu sosialisasi. Sesekali kita juga sampaikan rasa simpati terhadap situasi mereka, dan doa agar bisa segera lebih baik kondisinya,” tambah Abdi.

Seorang penyandang disabilitas bernama Irsan, mengaku sangat senang KPU Bombana bisa berkunjung ke rumahnya, yang berlantai tanah dengan dinding papan yang sudah lapuk tersebut. Menurutny, meski tak bisa melihat, ia selalu berusaha ke TPS saat pemilihan.

“Saya juga kan punya hak pak, Insya Allah saya ke TPS nanti,” kata pria yang mengaku bekerja sebagai pemanjat kelapa ini.

Di Desa Taubonto, lain lagi. Seorang perempuan tua yang tuna netra dan rungu, menangis ketika anggota KPU Bombana mendatangi kediamannya. Perempuan yang saat masih sehat bekerja sebagai dukung bersalin ini khawatir jika usianya tak panjang lagi, dan tak bisa sempat ke TPS.

Selain di Rarowatu, sehari sebelumnya, tiga anggota KPU Bombana yakni Abdi Mahatma, Kasjumriati Kadir dan Muh Safril juga menggelar sosialisasi di Kecamatan Matausu, sebuah wilayah dengan medan yang sulit dijangkau. Sasarannya adalah pemilih perempuan.

Untuk sampai ke lokasi sosialisasi, harus dengan kendaraan khusus. Roda empat, harus double handle. Sedangkan roda dua, lebih mudah dengan motor jenis trail.

“Kalau sedang hujan, bukan hanya lumpur dan jalan licin, kadang harus berhadapan dengan tiga anak sungai yang meluap,” kata Kasriwanto, Ketua PPK Matausu.

Pelabuhan Paria Poleang segera Dibangun, Kabaena Tahap Pengusulan

Rumbia, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat kucuran anggaran senilai Rp 6,5 miliar untuk pembangunan pelabuhan di Desa Paria, Kecamatan Poleang Tengah. Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bombana Syahrin, ST mengungkapkan, usulan pembangunan pelabuhan itu diusulkan sejak tahun 2018 lalu dan Kemendes PDTT merespon usulan itu melalui DAK Afirmasi dengan dukungan berbagai indikator serta dokumen yang ada.

“Alhamdulillah, pembangunan pelabuhan yang kami usulkan dapat jawaban dari pemerintah pusat dan di dua desa yakni Desa Paria dan Desa Mulaeno akan di kerjakan tahun ini melalui pelelangan,” ungkap Syahrin di Rumbia, Rabu (23/1/2019).

Pembangunan pelabuhan tersebut lanjut syahrin disebabkan kondisi fisiknya yang cukup memprihatinkan. Mengingat wilayah tersebut sangat strategis dan dapat menjadi akses ke beberapa pulau yang ada di bombana, juga dapat memudahkan akses ke pulau buton, pajaladan bajoe.

” Mudah mudahan rencana pembangunan pelabuhan ini dapat membantu masyarakat Poleang menuju daerah lain tanpa harus memutar lagi melalui Pelabuhan Kasipute” Bebernya.

Selain itu, saat ini pihaknya tengah mengupayakan pembangunan pelabuhan di wilayah Kabaena.

“ Kami menargetkan dapat membangun pelabuhan di kabaena, meski anggaran cukup besar. Kami masih sementara melengkapi dokumennya

untuk diusulkan ke Kemendes PDTT,” tutupnya. (Efendi)

Cuaca Buruk Di Wakatobi, Syahbandar : Kapal Yang Menuju Selatan Harap Ditunda

Wakatobi, SultraNET. | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan gelombang tinggi mencapai 4.0 meter pada akhir Januari 2019 yang akan melanda beberapa wilayah perairan di Indonesia termasuk Kepulauan Wakatobi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pelaksana Kepala Syahbandar wilayah kerja I pelabuhan Wanci, Abdul Rahim menghimbau agar nelayan yang berfaktifitas disekitar Perairan kepulauan Wakatobi menunda keberangkatannya.

“Bagi para nelayan yang ingin berangkat menuju bagian selatan, contohnya kapal dari Wanci menuju Wakatobi dua agar menunda keberangkatan,” ujarnya.

Sedangkan untuk kapal yang beroperasi di wilayah bagian utara seperti kapal yang menuju Bau-Bau dan Kendari dipersilahkan oleh Syahbandar.

“Asal jangan kapal kecil, kapal pelni kami persilahkan,” ucapnya.

Selain gelombang tinggi, diperkirakan wilayah yang masuk dalam wilayah Sulawesi Tenggara akan berpotensi hujan lebat.

APBD ditetapkan, Wabup Muna Apresiasi DPRD

MUNA, SultraNET. | Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat sidang paripurna II digedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) Selasa malam (22/01/2019).

Abdul Malik Ditu Wakil Bupati (Wabup) Muna, mengapresiasi kerja DPRD dalam melakukan pembahasan yang begitu alot dan mengesahkan menjadi Perda APBD. Katanya, kalau pembahasan tidak alot, berarti tidak mendapat tanggapan serius. DPRD adalah nafas rakyat yang tahu persis akan kebutuhan dasar.

“Makanya kita apresiasi yang telah teliti dalam melakukan pembahasan” Katanya

Lanjut Mantan Ketua DPC Demokrat itu, bupati dan wabup dilantik satu paket sehingga anggaran yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat harus ditetapkan bersama-sama dengan tidak membawa kepentingan pribadi atau golongan.

“Anggaran itu harus disetujui bersama. Karena, kalau menyimpang bupati dan wabup sama-sama akan diikat,” bebernya.

Malik Ditu menambahkan menyinggung soal pinjaman Pemkab Muna di bank sebesar Rp 96 M. Menurutnya, bila daerah sudah melakukan pinjaman berarti itu miskin. Karenanya, pinjaman itu harus digunakan sebaik-baiknya untuk program pembangunan yang benar-benar menyentuh masyarakat.

“ Jangan gunakan pinjaman itu untuk mewah-mewahan dan bodohi masyarakat. Saya apresiasi dewan yang cermat menyetujui program-program yang dibiayai oleh pinjaman,” ucapnya.

Setelah ditetapkan APBD, Malik menekankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan perencanaan secara matang. Apalagi yang menyangkut harga satuan barang. Insya Allah kalau kita seiring sejalan visi misi kita bisa tercapai dan program yang dihasilkan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat muna.

Untuk diketahui, anggaran 2019 yang disetujui terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp 1.247.796.088.591, belanja daerah Rp 1.316.931.755.263, pembiayaan daerah Rp 99.404.000.000, Silpa tahun anggaran sebelumnya Rp 3.404.000.000, penerimaan pinjaman daerah Rp 96.000.000.000, pengeluaran pembiayaan daerah Rp 30.268.333.328, pembayaran pokok utang Rp 30.268.333.328 dan pembiayaan netto Rp 69.135.666.672. (Rustam)

Kuliah Umum, Yusril Ihza Mahendra : Demokrasi Harus di Bangun Dari Akar Budaya Bangsa

Kendari, SultraNET. | Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara Indonesia Prof. Yusril Ihza Mahendra sebut untuk mengembangkan demokrasi harus di bangun dari akar budaya bangsa itu sendiri, hal itu disampaikan saat membawakan kuliah umum di Universitas Sulawesi Tenggara pada Senin, (21/1/2019).

Menurutnya, sebagai pakar hukum tata negara, perjalanan demokrasi kita, banyak mengalami hambatan baik dimasa lalu hingga di masa sekarang, sehingga perlu adanya pengembangan demokrasi yang sejalan dengan jiwa dan kepribadian bangsa kita di masa yang akan datang.

“Membangun demokrasi yang sebenarnya adalah harus dibangun dari akar budaya bangsa Indonesia sendiri. Karena demokrasi satu orang satu suara itu tidak sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia apalagi

mengawasinya sangat sulit karena money politik sangat tinggi dan tidak bisa diawasi” ucap Yusril

Ditempat yang sama Rektor Unsultra Prof. Dr. Andi Bahrnun mengatakan, suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi civitas akademika Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) atas kuliah umum yang dibawahkan Yusril.

” Dengan tema yang kami tawarkan kepada Prof Yusril sudah sangat cocok karena dia adalah tokoh bangsa kita, negarawan, dan pakar ketatanegaraan. sehingga kami merasa bahwa mahasiswa dan civitas akademika dan juga masyarakat membutuhkan pencerahan dari Yusril terkait dengan demokrasi dan masa depan Indonesia” jelas dia

Bukan hanya itu, dirinya juga sangat mengapresiasi kinerja BEM dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut dan turut mengajak pimpinan lembaga kemahasiswaan perguruan tinggi Negeri maupun Swasta yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari.

“Apa yang di sampaikan oleh pak Yusril sebenarnya itu bagaimana caranya mahasiswa mencari, menemukan akar masalah, memformulasi dan menemukan solusinya” tutup Prof Andi Bahrnun

Surat Keterangan Bebas Narkoba Wajib di Miliki Calon Pengantin

Kendari, SultraNET. | Dalam upaya mewujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah (Samawa) yang bebas dari Narkoba, Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bekerjasama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra bentuk kesepakatan, calon pengantin baik pria maupun wanita harus memiliki Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNNP sebelum pelaksanaan

pernikahan berlangsung.

Diungkapkannya Kepala Kantor Kemenag Sultra Abdul Kadir , dalam kesepakatan bersama itu, pihak kemenag dan BBNP telah di sepakat dan menuangkan kesepakatan bersama dalam MoU antara BBNP dan Kemenag pada Hari Senin (21/1/19) di ruang aula Kantor Kemenag Sultra.

“Dalam Kesepakatan itu terdapat dua Poin Penting yang harus di ketahui masyarakat pertama, aturan ini merupakan usaha dari Kemenag Prov. Dan BBNP Prov. untuk memberikan pelayanan terbaik dalam membentuk keluarga yang Samawa, Kedua, guna mempersiapkan generasi keluarga yang bebas Narkoba” ucap Abdul Kadir

Lebih lanjut, Mantan Ketua Senat Dosen IAIN Kendari menjelaskan sebelum berlangsungnya sebuah pernikahan maka kedua calon mempelai harus terlebih dahulu menyiapkan berkas - berkas yang dibutuhkan didalam

“Dalam aturannya kan, pernikahan itu ada persiapan terlebih dahulu, bahkan sepuluh hari sebelum menikah calon pengantin harus sudah melapor, nah pada kesempatan itu sudah bisa melakukan tes.” jelas dia

Ditempat yang sama Kepala BBNP Sultra, Brigjen Pol. Bambang Priyambadha menambahkan, apabila calon pengantin positif menggunakan Narkoba, maka pihak yang bersangkutan akan menjalani rehabilitasi dan edukasi terlebih dulu. Namun, bukan berarti pernikahan akan dibatalkan

” Program ini merupakan program yang sangat baik dalam rangka mewujudkan keluarga yang bebas dari narkoba sehingga keturunan dari keluarga itu sudah teebukti tidak terinfeksi Narkoba” bebernya